

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Kinerja Belanja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilakukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Analisis Varians Belanja secara keseluruhan selama lima tahun Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki rata-rata sebesar 93,41% artinya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika NTT dinilai baik. Dimana tahun 2017-2021 Pemerintah Nusa Tenggara Timur menggunakan kurang dari 100% dari jumlah yang dianggarkan. Namun dari segi nominal jumlah realisasi belanja Dinas Komunikasi dan Informatika mengalami kenaikan, akan tetapi jumlah tersebut masih relative kecil dari jumlah anggaran yang telah ditetapkan sehingga kinerja masih dinilai baik dan dapat memanfaatkan anggaran belanja tidak melebihi jumlah yang dianggarkan.
2. Pertumbuhan realisasi anggaran belanja pada instansi Dinas Komunikasi dan Informatika NTT berdasarkan Analisis Pertumbuhan Belanja dari tahun 2017-2021 terus mengalami perubahandan menunjukkan adanya pertumbuhan yang cukup efisien. Kecuali pada tahun 2019 pertumbuhan belanja mengalami peningkatan persentase sebesar 5,74%.
3. Berdasarkan hasil analisis Belanja Operasi terhadap Total Belanja memiliki rata-rata sebesar 96,02%, artinya kinerja belanja operasi dapat dikategorikan baik. Namun dalam hal ini Dinas Komunikasi dan Informatika NTT masi belum menunjukkan kinerja yang kurang baik, hal ini disebabkan karena

Diskominfo lebih mengoptimalkan belanja operasional yang meliputi belanja pegawai dan belanja barang dan jasa .

4. Berdasarkan hasil analisis Belanja Modal terhadap Total Belanja daerah pada tahun 2017-2021 memiliki rata-rata sebesar 6,98%, artinya kinerja belanja modal dapat dikategorikan kurang baik.
5. Berdasarkan analisis Efisiensi Belanja bahwa keseluruhan rata-rata belanja daerah dapat dikategorikan efisien, artinya kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika NTT pada tahun 2017-2021 telah melakukan efisiensi belanja atau tidak terjadi pemborosan dalam penggunaan anggaran.

6.1 Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Dari segi pertumbuhan belanja berdasarkan periode 2017-2021 memberikan gambaran bahwa angka persentase yang ditunjukkan dari hasil perhitungan bisa saja dijadikan acuan untuk penyusunan anggaran agar lebih baik lagi di periode tahun anggaran selanjutnya.
- b. Sebaiknya Dinas Komunikasi dan Informatika NTT dapat meningkatkan realisasi belanja pada belanja modal, dan tetap mengefisiensikan belanja pada belanja operasi. Karena dalam hal ini Diskominfo NTT lebih mengoptimalkan belanja daerah pada belanja operasi, sehingga menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengeluaran anggaran untuk belanja operasi dan belanja modal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Nugroho. (2012). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Intellectual Capital Disclosure*. Accounting Analysis. Vol 1 (2).
- Apriyanti, F. W., Tiara, S., & Dewi, R. S. (2019, September). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Kabupaten Serdang Bedagai. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 2, No. 2, pp. 1289-1298).
- Fatmawati, Desi. (2017). *Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2013-2015*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Grace, Liando. (2016). *Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Jurnal EMBA. Vol 4. Hal. 1473-1484
- Halim, Abdul. (2008). *Auditing (dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*. UUP STIM
- Halim, Abdul. (2014). *Teori, Konsep dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Harahap, Sofyan Syafri. (2011). *Teori Akuntansi*. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Kamrudin, Ahmad. (2013). *Akuntansi Manajemen*. PT. Raja Grafindo, Jakarta.
- Kuncoro, Mudjarat. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi. Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Edisi 3. Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. UII Press, Yogyakarta.
- Mahsun, M. (2009). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik*. Edisi Pertama. BPF, Yogyakarta.
- Nordiawan Deddi, dkk. (2008). *Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintahan Republik Indonesia. 2019. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Jakarta.
- Purwaningsih, H., & Khabibah, N. A. (2021). Analisis Anggaran Belanja Untuk Menilai Kinerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah. *Jesya (Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah)*, 4(1), 14-23.

- Ratnasari, W., & Munawaroh, S. (2019). Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Sosial Kabupaten Berau. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 2(1), 49-58.
- Saderi, S., & Sriwardany, S. (2021). Analisis Kinerja Belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara. *AFoSJ-LAS (All Fields of Science Journal Liaison Academia and Society)*, 1(4), 113-124.
- Sartika, Dewi. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Selamat, Kristianus. (2008). *Analisis Kinerja Pajak Daerah Kabupaten Manggarai Barat*. Jurnal Ekonomi Pembangunan: 12
- Setiani, T., & Madila, R. N. (2019). Analisis Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pada Pemerintah Kota Cimahi Periode 2009-2018. *Jurnal Akuntansi*, 12(02), 103-111.
- Siregar, Baldric. (2015). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Suartini, S. (2019). Analisis Laporan Realisasi Anggaran Khusus Kelurahan (Akk) 2016-2017 Studi Kasus (Kelurahan Adiarsa Barat Kabupaten Karawang). *Eqien-Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 6(2), 80-88.
- Tantri, S. N., & Irmawati, P. (2018). Analisis Kinerja Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2012–2016. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 1(1), 27-37.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara